

## **DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

(Studi Kasus di Pulau Jawa)

Dita Maharani Suwardi, Universitas Pendidikan Indonesia

dita.ms@upi.edu

Dicky Ramadhan Sudarajat, Universitas Pendidikan Indonesia

dickyramasu@upi.edu

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Metode penelitian yang digunakan ialah korelasional dengan sampel penelitian terdiri dari 6 provinsi. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2004 hingga 2018, dengan menggunakan jenis data panel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan menggunakan penekatan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil yang diperoleh ialah bahwa hubungan desentralisasi fiskal pada pengeluaran pemerintah provinsi menunjukkan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pada penerimaan pajak menunjukkan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Tinggi dan rendahnya pengeluaran dana pemerintah daerah membawa suatu implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus membuat rancangan alokasi dana secara matang agar dapat meminimalisir pengeluaran yang dianggap memboroskan alokasi dana daerah.*

**Kata Kunci :** *desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, pulau jawa*

### **ABSTRACT**

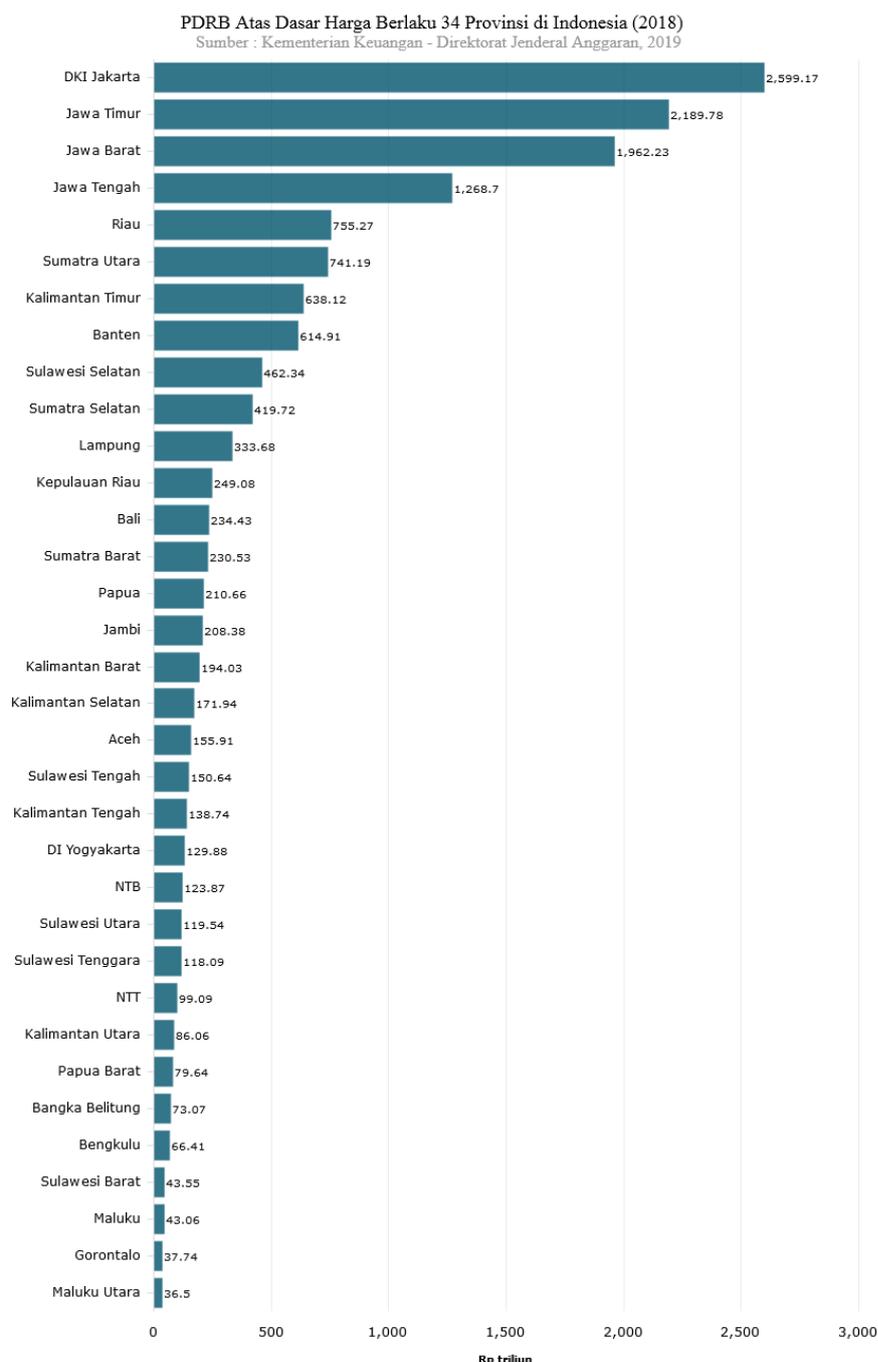
*The aim of this research is to analyze the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Java. The research method used is correlation with the research sample consisting of 6 provinces. The research data source uses secondary data obtained from survey results from the Central Statistics Agency (BPS) from 2004 to 2018, using panel data types. The data analysis technique used regression analysis using the Ordinary Least Square (OLS) model. The results obtained are that the relationship of fiscal decentralization to provincial government spending shows a negative effect on economic growth, and tax revenue shows a positive effect on economic growth in Java. The high and low spending of local government funds has implications for economic growth. The regional government must prepare a plan for the allocation of funds carefully in order to minimize expenditures that are considered to be a waste of regional allocations.*

**Keywords:** *fiscal decentralization, economic growth, java island*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal telah menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik dan efisien. Pertumbuhan ekonomi selalu dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang (Oates, 1993) Indonesia dalam pelaksanaan penerapan sistem desentralisasi fiskal di era reformasi dimulai secara resmi pada tanggal 01 Januari 2000, yang prosesnya diawali dari dikeluarkannya UU nomor 22 Tahun 1999. Hal ini berlaku juga pada pemerintahan tiap provinsi di pulau Jawa dalam penerapan sistem desentralisasi fiskal. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan karakteristik yang melekat pada daerah tersebut. Untuk mengetahui apakah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ?, maka dibutuhkan pengamatan lebih mengenai proporsi belanja daerah, kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara singkatnya, desentralisasi fiskal pada umumnya dilihat dari kontribusi penerimaan pajak dan pengeluaran (belanja daerah) pemerintah guna untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan berdasarkan hasil survei BPS, bahwa pulau Jawa masih mendominasi dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gambar (1) menjelaskan bahwa keempat provinsi di pulau Jawa menduduki peringkat paling atas dalam memperoleh PDRB paling banyak berdasarkan atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2018. Maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia.

Desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empiris yang juga terus berkembang (Oates, 1993). Desentralisasi fiskal, pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah kuantitas pengeluaran pemerintah, namun ada tahap selanjutnya mengenai aspek-aspek lain dari kebijakan pemerintah. Penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda. Davood-Zou (1998) yang menggunakan data panel dengan jumlah observasi 46 negara maju dan berkembang antara tahun 1970 - 1989 menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi baik negara berkembang ataupun negara maju tetapi tidak signifikan secara statistik bahwa desentralisasi fisik dalam pengeluaran pemerintah daerah tidak mencerminkan otonomi daerah dalam pengambilan keputusan pengeluaran pemerintah daerah.



Gambar 1. PDRB atas harga berlaku di 34 Provinsi tahun 2018

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jin dan Zou (2002) juga telah melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel di China, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa desentralisasi pengeluaran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi- provinsi China.

Thornton (2007) dengan menggunakan data dari 19 negara yang bergabung dalam OECD, mengatakan bahwa desentralisasi fiskal pada pendapatan pemerintah berupa pajak tidak mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi berdasarkan hasil empirik, desentralisasi pendapatan terbatas pada pendapatan pemerintah daerah yang memiliki otonomi penuh akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi OECD walaupun tidak signifikan secara statistik.

Desentralisasi fiskal merupakan masalah paling kompleks dengan berbagai macam dimensi, sebagaimana yang telah diteliti oleh para peneliti. Artikel ini lebih memfokuskan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, terbentuklah permasalahan yang ingin kami kaji yaitu apakah benar bahwa dengan desentralisasi fiskal dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dimana sampel penelitian ini ialah provinsi di pulau Jawa. Sehingga muncul tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan sehingga mengetahui mengenai hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa.

## METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif. Meninjau bagaimana dampak dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Jawa, disini peneliti menggunakan data panel dari tahun 2004 hingga 2018. Berdasarkan literatur dari Oates (1993), Davood-Zou (1998), dan Nobuo Akai (2002), pengeluaran dan pajak yang diperoleh pemerintah baik pusat ataupun daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Persamaan fungsi regresi pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini mengikuti persamaan yang dibuat oleh Davood-Zou (1998) dengan menggunakan model pendekatan *ordinary least square* (OLS). Formula dari persamaan regresi pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut;

$$Eg_{it} = \alpha + \beta_1 T_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 Prov + \beta_4 t + \beta_5 Z_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana,

$i$  : provinsi (= 1, 2, ..., I)

$t$  : waktu (= 1, 2, ..., *Time*)

$\alpha$  : koefisien konstanta

$\beta$  : koefisien regresi

$Eg_{it}$  : pertumbuhan ekonomi

$T_{it}$  : pajak

$E_{it}$  : pengeluaran pemerintah provinsi

$Z_{it}$  : variabel kontrol

$\epsilon$  : galat *error*

Sebagaimana dalam persamaan regresi, variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB per kapita ( $Eg$ ) yang diperoleh pemerintah provinsi dalam satuan ribu rupiah. Sedangkan untuk variabel bebas ialah penerimaan pajak daerah ( $T$ ) dan pengeluaran pemerintah ( $E$ ) yang dilihat dari tingkat kemampuan belanja pemerintah provinsi tiap tahunnya. Penentuan variabel kontrol dalam penelitian ada yang berbeda dengan persamaan regresi Davood-Zou (1998), yaitu pendidikan digantikan menjadi pertumbuhan angkatan kerja. Sehingga variabel kontrol terdiri dari, (1) jumlah penduduk, (2) pertumbuhan tenaga kerja, (3) pendapatan asli pemerintah provinsi, dan (5) investasi. Keseluruhan data diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dimulai dari data PDRB per kapita hingga data investasi tiap provinsi di pulau Jawa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 1, dimana dalam analisis regresi kami menggunakan, (1) menggrupkan keenam provinsi, dan (2) ada atau tidaknya variabel kontrol. Tabel 1 memperlihatkan nilai koefisien (baris pertama dan nilai  $t_{hitung}$  (baris bawah) yang diberi tanda kurung dengan level signifikan yang digunakan dalam *one-tail test* ialah 5% dan 10%. Menggunakan *one-tail test* lebih cocok dalam membandingkan hipotesis karena hipotesis dalam hubungan

desentralisasi fiskal dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif. Pada pengeluaran pemerintah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang negatif, tetapi sebaliknya dengan penerimaan pajak daerah. Hal ini dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah baik pada kolom 1-5 menunjukkan negatif, sedangkan nilai koefisien pajak daerah menunjukkan positif.

Nilai  $t_{hitung}$  juga menunjukkan bahwa hanya pajak daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk pengeluaran pemerintah provinsi tidak mempengaruhi. Dimana nilai  $t_{hitung}$  pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (1,29), sedangkan nilai  $t_{hitung}$  pengeluaran pemerintah provinsi lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (1,29).

Besaran pajak daerah yang diterima pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pajak daerah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi provinsi. Semakin tinggi perolehan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan daerah

**TABEL 1**  
**OUTPUT REGRESI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI**

Dep. Var : PRDB Per Kapita					
Indep. Var.	1	2	3	4	5
Koef.	3748,781 (0,553)	23957,992 (4,331)	27434,783 (5,168)	28091,532 (4,988)	11224,273 (1,573)
Pajak	0,006 (4,463)	0,005 (5,789)	0,006 (6,771)	0,007 (4,707)	0,005 (3,687)
Pengeluaran Pemerintah Provinsi	-0,001 (-1,039)	-0,001 (-1,081)	-0,001 (-2,051)	-0,001 (-1,099)	-0,001 (-1,156)
Variabel Dummy (2004-2018)	-456,426 (-0,696)	-338,400 (-0,700)	-71,234 (-0,154)	-43,751 (-0,093)	289,670 (0,642)
Jumlah Penduduk		-0,828 (-8,510)	-3,251 (-4,547)	-3,356 (-4,335)	-2,295 (-2,921)
Angkatan Kerja			0,005 (3,417)	0,05 (3,309)	0,003 (2,281)
Pendapatan Asli Pemerintah Provinsi				0,000 (-0,365)	0,001 (0,795)
Investasi					-0,810 (-3,613)
Koef. Determinasi (R <sup>2</sup> )	0,750	0,866	0,822		0,898
Standard Error					
F <sub>hitung</sub>	63,636	108,168	103,540		89,033
Prob. > F	0,000	0,000	0,000		0,000

Sumber : Hasil olah data, 2019.

Secara keseluruhan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  dan nilai sig. yang diperoleh. Nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  (3,10) dengan menggunakan level sig. 5% menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  jauh lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , yang artinya bahwa adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan yang menyebabkan desentralisasi fiskal pada pengeluaran pemerintah daerah yang menunjukkan negatif pada pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh banyak hal, tetapi dalam penelitian ini tidak menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pembagian dana alokasi pengeluaran daerah.

## KESIMPULAN

Hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa menunjukkan negatif pada pengeluaran pemerintah daerah dan positif pada penerimaan pajak daerah. Hubungan negatif pada pengeluaran pemerintah daerah menyatakan bahwa sebesar apapun tingkat proporsi daya belanja pemerintah daerah tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, hanya penerimaan pajak daerah yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini selaras dengan penelitian Davooid-Zou (1998), bahwa desentralisasi fiskal pada pengeluaran pemerintah daerah tidak menunjukkan adanya dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah menunjukkan bukan kategori dalam mencerminkan pengambilan keputusan suatu pengeluaran pemerintah daerah.

Sayangnya desentralisasi fiskal di pulau Jawa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak sejalan dengan tujuan dari desentralisasi tersebut, dimana dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui pajak dan pengeluaran pemerintah daerah. Tinggi dan rendahnya pengeluaran dana pemerintah daerah membawa suatu implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus membuat rancangan alokasi dana secara matang agar dapat meminimalisir pengeluaran yang dianggap memboroskan alokasi dana daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N and Sakata, M(2002). *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth:evidence from state level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics*, 52, 93-108.
- BPS(2004-2018). Statistik Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- BPS(2004-2018). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Davooid, H and Zou, H(1998). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. Journal of Urban Economics* 43, 244-257.
- Jin, J & Zou, H. (2002). *How does Fiscal Decentralization Affect Aggregate, National, and Subnational Government Size?. Journal of Urban Economics*, 52(2), 270-293.
- Lin, J and Liu, Z(2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*, ABI/INFORM Global pg. 1.
- Oates (1993). *Fiscal Decentralization and Economic Development*. New York : National Tax Journal, 46 (2), 237-243.
- Thornton, J (2007). *Fiscal Decentralization And Economic Growth Reconsidered. Journal of Urban Economics* 61, 64-70.
- Xie, Zou, and Davoodi, 1999. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in United States*. Hong Kong : Hong Kong University

